

# KINERJA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DALAM PEMENUHAN INFORMASI PUBLIK DI KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU

Nurfarahin Ilma

NPP. 30.0572

Asdaf Kabupaten Siak, Provinsi Riau

Program Studi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan

Email : [ilmanurfarahin@gmail.com](mailto:ilmanurfarahin@gmail.com)

Pembimbing Skripsi : Dedhy Guntoro, SE, MM

## ABSTRACT

**Problem Statement/ Background (GAP) :** Dissemination of information that occurs more quickly makes the disclosure of public information in Indonesia an important part in optimizing public supervision in order to realize good governance. PPID Siak Regency is an institution that plays a very important role in fulfilling public information in Siak Regency. **The Purpose :** to determine the performance of PPID in fulfilling public information in Siak Regency. **The method** is descriptive qualitative. The data sources used are primary data sources and secondary data sources. Data collection techniques with interviews, observation and documentation. The data analysis technique used is data reduction, data classification, and data verification. The theory used is the Performance Theory according to Agus Dwiyanto in 2008. **The results** of the field analysis state that based on the Performance Theory, PPID's performance in Siak Regency has not been maximized. However, in some indicators it is said to be quite good. Coordination between the Main PPID and the Supporting PPID in terms of submitting a list of public information creates delays and difficulties in terms of implementation and public information services. **The Conclusion** Efforts are being made to make further socialization to the PPID Assistant regarding the importance of submitting a list of public information on a regular basis. Suggestions to Diskominfo of Siak Regency as PPID manager is to make PPID Assistant more actively participate in the implementation of public information disclosure and utilize available infrastructure and human resources in order to realize good public information disclosure in Siak Regency.

**Keyword : Performance, Information, Public Information Disclosure.**

## ABSTRAK

**Pernyataan Masalah/ Latar Belakang (GAP) :** Penyebaran informasi yang terjadi semakin cepat membuat keterbukaan informasi publik di Indonesia menjadi bagian penting dalam mengoptimalkan pengawasan publik dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang

baik. PPID Kabupaten Siak menjadi lembaga yang sangat berperan dalam pemenuhan informasi publik di Kabupaten Siak. **Tujuan** penelitian ini untuk mengetahui kinerja PPID dalam pemenuhan informasi publik di Kabupaten Siak. **Metode** yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif. Sumber data yang digunakan ialah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan ialah dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teori yang digunakan ialah Teori Kinerja menurut Agus Dwiyanto Tahun 2008. **Hasil** analisis dilapangan menyatakan bahwa berdasarkan Teori Kinerja, kinerja PPID di Kabupaten Siak belum maksimal. Namun, dalam beberapa indikator sudah dikatakan cukup baik. Koordinasi antara PPID Utama dengan PPID Pembantu dalam hal penyerahan daftar informasi publik membuat keterlambatan serta kesulitan dalam hal pelaksanaan serta pelayanan informasi publik. **Kesimpulan** Upaya yang dilakukan ialah dengan membuat sosialisasi lagi kepada PPID Pembantu mengenai pentingnya penyerahan daftar informasi publik secara berkala. Saran kepada Diskominfo Kabupaten Siak selaku pengelola PPID ialah dengan lebih membuat PPID Pembantu berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik dan memanfaatkan sarana prasarana serta sumber daya manusia yang tersedia demi mewujudkan keterbukaan informasi publik yang baik di Kabupaten Siak.

**Kata Kunci : Kinerja, Informasi, Keterbukaan Informasi Publik.**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Penyebaran informasi mengalami peningkatan juga perkembangan yang cukup pesat dalam era globalisasi ini. Penyebaran informasi kita ketahui sendiri bisa melalui berbagai media contohnya seperti televisi, radio, internet, media cetak dan lainnya. Pemerintah mengeluarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 yang mana di dalamnya disebutkan pemerintah menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan tujuan yaitu demi mencapai pelayanan yang berkualitas untuk mendukung terpenuhinya hak masyarakat keterbukaan informasi. Disebutkan juga bahwa setiap organisasi pemerintah dan pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah diwajibkan untuk membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, hal ini tertulis pada Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010. Inilah dasar hukum atas pembentukan PPID sebagai implementasi keterbukaan informasi publik dari pemerintah. PPID Kabupaten Siak atau disebut juga PPID Utama dibantu oleh PPID Pembantu dalam membawahi kepentingan dan urusan di lingkungan pemerintah Kabupaten Siak dalam pelaksanaan tugasnya. Hadirnya PPID Kabupaten Siak yang berfungsi sebagai jembatan dalam pemberian pelayanan informasi publik kepada masyarakat Kabupaten Siak memiliki peranan sebagai sarana bagi masyarakat dalam memperoleh informasi publik yang tepat dan baik agar terpenuhinya partisipasi masyarakat dalam setiap proses pemerintahan dan proses pembuatan kebijakan publik. Informasi dari semua badan publik merupakan informasi yang tidak hanya milik badan publik atau pemerintah tetapi juga milik rakyat dan rakyat perlu memiliki akses terhadap informasi publik. masih kurangnya pengetahuan masyarakat dalam mengetahui dan memanfaatkan sumber dari pelayanan informasi publik yang tersedia. Pada tahun 2021 kita lihat hanya 4 orang yang mengakses dan mengajukan permohonan informasi kepada PPID Kabupaten Siak, dan di tahun 2022 terdata sampai bulan November 2021, hanya 1 orang yang mengakses dan mengajukan permohonan informasi kepada PPID Kabupaten Siak. Terhitung dari 2021 hingga 2022 pertumbuhan minat masyarakat

terhadap keterbukaan informasi publik mengalami penurunan sebanyak 3 orang. Menurut data sensus Penduduk tahun 2022, jumlah penduduk Kabupaten Siak pada tahun 2022 sebanyak 466.683 jiwa. Apabila dihitung dan dibandingkan dengan total 466.683 penduduk Kabupaten Siak (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 'Kabupaten Siak Dalam Angka 2022', 2022)., data permohonan informasi pada tahun 2021 hanya sekitar 0,0009% masyarakat yang memanfaatkan ketersediaan informasi publik tersebut, dan pada tahun 2022 berada di angka 0,0002%. Beberapa hal tersebut tentunya dipengaruhi juga oleh kinerja dari PPID dalam melaksanakan sosialisasi mengenai keterbukaan informasi publik maupun mengenai PPID kepada masyarakat. Kualitas pelayanan keterbukaan informasi publik perlu senantiasa ditingkatkan agar tercapainya pengelolaan serta pelayanan informasi yang berkualitas, cepat, mudah dan ringan biaya. Serta untuk meningkatkan kualitas kinerja badan publik maupun pemerintah menjadi lembaga yang transparan, akuntabel, serta efektif dan efisien sesuai dengan prinsip *good governance*.

## **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Secara aktual terdapat permasalahan penting yang berkaitan dengan Kinerja pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dalam pemenuhan informasi publik di Kabupaten Siak kemudian melatarbelakangi penelitian ini. Adapun permasalahan yang teridentifikasi adalah sebagai berikut :

- 1) saat ini, masih terdapat banyak masyarakat yang bahkan belum mengetahui serta belum memanfaatkan hak keterbukaan informasi publik. Seperti yang diketahui sendiri hak tersebut seharusnya dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat untuk pemanfaatan secara pribadi maupun untuk lingkungan. Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam pemanfaatan hak keterbukaan informasi publik juga membuat masyarakat menjadi kurang ikut serta dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang transparan maupun proses pembuatan kebijakan public
- 2) terdapat juga banyak masyarakat yang masih belum mengetahui akan hadirnya PPID sebagai salah satu pintu utama penyelenggaraan serta penyediaan informasi publik. Hal ini sangat disayangkan mengingat peran PPID yang sangat krusial dalam penyebaran maupun penyediaan informasi publik.
- 3) Terhitung dari 2021 hingga 2022 pertumbuhan minat masyarakat terhadap keterbukaan informasi publik mengalami penurunan sebanyak 3 orang. Menurut data sensus Penduduk tahun 2022, jumlah penduduk Kabupaten Siak pada tahun 2022 sebanyak 466.683 jiwa. Apabila dihitung dan dibandingkan dengan total 466.683 penduduk Kabupaten Siak (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 'Kabupaten Siak Dalam Angka 2022', 2022)., data permohonan informasi pada tahun 2021 hanya sekitar 0,0009% masyarakat yang memanfaatkan ketersediaan informasi publik tersebut, dan pada tahun 2022 berada di angka 0,0002%.

## **1.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi dari penelitian sebelumnya dalam konteks Kinerja pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dalam pemenuhan informasi publik. Penelitian pertama dari Desti Miranda dengan judul penelitian Kinerja Diskominfo Kabupaten Ketapang Dalam Pengelolaan Penyelenggaraan Informasi Publik. Hasil penelitian menunjukkan Kinerja Tim PPID Kabupaten Ketapang dalam pengelolaan dan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik masih belum

optimal (Desti Miranda, 2018). Penelitian kedua dari Khairul Fikri dengan judul penelitian Peran PPID dalam Pelayanan dan Penyediaan Informasi Publik di Provinsi Riau. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah Deskriptif Kualitatif; Teknik pengumpulan data: Observasi, dan Wawancara. Hasil penelitian menunjukkan Peran PPID dalam pelayanan dan penyediaan informasi publik sudah cukup optimal. Namun masih terdapatnya beberapa hambatan yang terjadi (Khairul Fikri, 2020). Penelitian ketiga dari Ira Novita dengan judul penelitian Peranan PPID Diskominfo dalam Pelayanan Informasi Publik di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh. Hasil penelitian menunjukkan PPID Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh berperan sebagai Administrator, Fasilitator, Operator Sistem Informasi dan Evaluator dalam hal pelayanan informasi public (Ira Novita, 2019).

#### **1.4 Pernyataan Kebaharuan Ilmiah**

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dengan penelitian terdahulu dimana pada penelitian pertama letak perbedaannya adalah pada fokus dimana penelitian pertama membahas salah satu kendala yaitu *website* PPID yang sangat tidak aktif sejak 2018. Perbedaan pada penelitian kedua Penelitian ini membahas bahwa salah satu kendala dari pelayanan PPID ialah banyaknya ketidakpuasan pemohon informasi dalam menerima jawaban informasi. Pada penelitian ketiga perbedaannya terletak pada Penelitian ini membahas bahwa salah satu kendala ialah kurangnya kerjasama antar PPID dengan staf bagian.

#### **1.5 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam Pemenuhan Informasi Publik Di Kabupaten Siak Provinsi Riau.

### **II. METODE**

peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif melalui pendekatan induktif. Menurut Sugiyono (2019:18), metode penelitian kualitatif didasarkan pada filosofi postpositivisme dan digunakan untuk mempelajari kondisi objek yang alami daripada eksperimen. Penelitian ini apabila ditinjau dari datanya, maka pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan kualitatif. Penelitian ini juga menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif ialah bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada. . Teknik pengumpulan data menggunakan teknik Triangulasi yaitu dengan observasi, dokumentasi, dan wawancara. Peneliti melakukan wawancara dengan 6 (enam) orang informan. Analisis data dengan penyajian data, reduksi data, analisis deskripsi serta penarikan kesimpulan. Adapun analisisnya menggunakan teori Kinerja Dwiyanto, Agus 2008

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Peneliti menganalisis Kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam Pemenuhan Informasi Publik Di Kabupaten Siak Provinsi Riau menggunakan teori Kinerja Dwiyanto, Agus 2008. adapun pembahasan dapat dilihat dalam subbab berikut :

#### **3.1 Produktivitas**

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam lingkup lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak sejauh ini belum memperlihatkan capaian kinerja sebagai lembaga pemenuh informasi publik yang baik dan sesuai dengan tujuan dibentuknya PPID. PPID dibentuk dengan tujuan terpenuhinya informasi publik bagi masyarakat, terwujudnya pelayanan informasi publik yang tepat, cepat dan sederhana serta menjanjikan pelayanan informasi yang mudah melalui satupintu yaitu PPID. PPID Utama memiliki kedudukan pada Dinas Komunikasi

dan Informatika Kabupaten Siak sedangkan PPID Pembantu berkedudukan pada Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab membantu dan mendukung pelaksanaan proses keterbukaan informasi publik kepada ketua PPID Utama Kabupaten Siak. PPID Pembantu sendiri memiliki tugas sebagai penyedia data maupun informasi publik bagi masyarakat sesuai dengan kewenangan dan bidang-bidangnya masing-masing. Menurut hasil observasi peneliti, PPID Kabupaten Siak sejauh ini sudah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai SOP Layanan Informasi PPID Kabupaten Siak.

### 3.2 Kualitas Layanan

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti selama penelitian, masih ditemukannya proses pemberian informasi oleh petugas kepada pemohon informasi juga mengalami kendala diantaranya yaitu keterlambatan pemberian informasi kepada masyarakat. Ketidaktepatan waktu dalam pemberian informasi juga dipengaruhi oleh ketersediaan data dan informasi publik yang tersedia di PPID Utama.

### 3.3 Responsivitas

Peneliti menyimpulkan berdasarkan hasil wawancara bahwa untuk ketersediaan data dan kelengkapan data serta pembaharuan data masih kurang di PPID Kabupaten Siak. Hal ini juga dibuktikan dengan ketersediaan serta jumlah informasi di Laman PPID Kabupaten Siak yaitu *ppid.siakkab.go.id* belum ada menunjukkan *update*. Berdasarkan hasil observasi peneliti, di masa pandemi ini masyarakat tentunya membutuhkan data-data serta berita mengenai *Covid-19* namun yang ditampilkan pada laman PPID Kabupaten Siak tersebut hanya sedikit info mengenai *Covid-19*.

Berikut adalah tampilan halaman awal dari laman PPID Kabupaten Siak *ppid.siakkab.go.id* :



**Gambar 3.3.1**  
**Tampilan Utama Laman *ppid.siakkab.go.id***

*Sumber : ppid.siakkab.go.id, diakses pada tanggal 20 Februari 2023*

### 3.4 Responsibilitas

Pada pelaksanaannya PPID Pembantu belum maksimal dalam penyerahan daftar informasi publik kepada PPID Utama. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang dijelaskan oleh Staf

Dinas Komunikasi dan Informatika Seksi Data Pengaduan dan Informasi, bahwa :Penyerahan kewajiban atas penyerahan daftar informasi kepada PPID dari OPD tidak berjalan dengan semestinya. Hal ini dibuktikan dengan, ketika masyarakat membutuhkan informasi publik yang seharusnya tersedia di PPID namun nyatanya belum ada. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti pada saat melakukan penelitian di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak mengenai penyerahan DIP dari OPD kepada PPID Utama ialah masih kurangnya koordinasi antara PPID Utama dan OPD Terkait. Untuk itu PPID Utama harus lebih memperhatikan dan menghimbau kepada OPD terkait agar lebih berpartisipasi aktif dalam melaksanakan tanggungjawab nya sebagai PPID Pembantu.

### **3.5 Akuntabilitas**

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, OPD sudah menyerahkan daftar informasi publik kepada PPID Utama namun informasi yang diberikan tidak lengkap serta diberikannya informasi tidak secara berkala. Hasil observasi peneliti juga menunjukkan bahwa PPID Utama maupun PPID Pembantu belum memiliki akuntabilitas dalam penyelenggaraan koordinasi untuk memenuhi kebutuhan informasi publik kepada masyarakat. Oleh karena itu, akuntabilitas atau pertanggungjawaban dari pihak OPD maupun PPID Utama sangatlah penting agar masing-masing pihak bertanggungjawab pada kewajibannya dalam pemenuhan informasi publik.

### **3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Kebaharuan penelitian ini dibandingkan dengan tiga penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini ditemukan pemenuhan informasi dari PPID kepada publik belum dapat dikatakan optimal. Penyelenggaraan kegiatan PPID Kabupaten Siak seharusnya berpacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa penyediaan informasi publik merupakan tugas dan tanggung jawab dari instansi pemerintah di pusat maupun di daerah serta organisasi pemerintah yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan pemerintahan. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak melalui aparatur dinas nya, memiliki peran sebagai unsur pemerintah daerah yang bertugas memfasilitasi para masyarakat dalam menjawab dan memenuhi hak seluruh masyarakat dalam memperoleh informasi publik serta memenuhi kewajiban setiap organisasi perangkat daerah atau badan publik untuk menyediakan serta melayani setiap permohonan informasi publik dari masyarakat.

### **3.6 Diskusi Temuan Menarik Lainnya**

Pelayanan pada masyarakat mengenai permohonan informasi publik seperti melalui lama resmi PPID Kabupaten Siak masih tergolong lambat dikarenakan masih kurang tersedia informasi yang dibutuhkan di PPID, data yang tersedia di laman resmi juga kurang informatif dan kurang *terupdate*.

## **IV. KESIMPULAN**

PPID Kabupaten Siak yang memiliki tugas sebagai penyedia utama layanan informasi publik untuk masyarakat Kabupaten Siak dirasa belum terlihat sesuai sebagaimana dengan tujuan dibentuknya PPID, yaitu dibentuknya PPID bertujuan untuk terwujudnya pelayanan yang senantiasa cepat, tepat dan berkualitas serta memberikan pelayanan informasi yang mudah bagi masyarakat yaitu hanya melalui satu pintu.

**Keterbatasan Penelitian :** penelitian ini memiliki keterbatasan utama yaitu waktu dan biaya penelitian. Penelitian ini sendiri hanya dilakukan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak Provinsi Riau.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future Work*)** : peneliti menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu peneliti menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam Pemenuhan Informasi Publik.

## **V. UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan syukur dan terima kasih kepada Allah SWT, dan Sholawat serta Salam kepada Junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, kepada keluarga khususnya kepada ibu dan Ayah yang senantiasa selalu mendoakan, terima kasih kepada orang-orang terdekat sudah selalu memberikan dukungan kepada saya. Terima kasih kepada dosen pembimbing saya yang telah membimbing saya dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih kepada keluarga besar di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak Provinsi Riau yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian di kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak Provinsi Riau.

## **VI DAFTAR PUSTAKA**

- Fikri, Khairul. 2020. “Peran Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Dalam Pelayanan Dan Penyediaan Informasi Publik Di Provinsi Riau”.
- Ira Novita. 2019. “Peranan PPID Diskominfo Dalam Pelayanan Informasi Publik Di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Aceh”.
- Miranda Desti. 2019. “Kinerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Ketapang Dalam Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik”.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta

